



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025-2029
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Formulir E. 68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Strategis
Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi				
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota				
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
7	Perumusan isu-isu strategis				
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota				
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				

11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota				
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah				
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota				
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota				
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka				

	menengah				
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota				
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan				

Bandar Lampung, September 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

RICARDO BNW, SH., MM

Pembina

NIP. 19750815 200902 1 002

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
Terhadap Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	

Bandar Lampung, September 2025

Mengetahui,
Plt. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si.	
	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	SUHERMAN	
	Fungsional Perencana Muda	

Dini Purnamawaty, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19701018 199303 2 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai landasan dan eksistensi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bandar Lampung guna mendukung Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029 yaitu *Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing, Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat*.

Rencana strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan isu-isu strategis bidang kelautan dan perikanan; tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan, sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kota Bandar Lampung 2025-2029; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029. Selanjutnya Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan Dan Perikanan dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan hingga tahun 2029 yang akan datang.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, terutama kepada seluruh staf Dinas Kelautan Perikanan Kota Bandar Lampung yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik.

Bandar Lampung, September 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

RICARDO BNW, SH., MM

Pembina

NIP. 19750815 200902 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.1.4 Kelompok Sasaran dan Layanan	47
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	47
2.2 Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah.....	47
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ...	47
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	48

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tahun 2025 - 2029.....	51
3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tahun 2025 - 2029.....	53

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	57
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.....	57

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program	62
4.2 Uraian Kegiatan.....	63
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	76
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pemabngunan Daerah	96
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	97
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	98

BAB V. PENUTUP

Penutup	100
---------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel TC. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	33
Tabel TC. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.....	34
Formulir E.80 Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Periode Pelaksanaan 2020-2024.....	38
Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah	50
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah	55
Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah	58
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah	61
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah	65
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	69
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	96
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	98
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah	54
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah	54
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah	63

LAMPIRAN 12
PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Atau Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar

Lampung Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024. RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodisasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih. Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2045 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodisasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2025-2029. Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Rencana Strategis, (2)

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis, (3) Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Rencana Strategis dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Wali Kota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan di Kota Bandar Lampung. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Rencana Strategis merupakan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55); Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025- 2045;
22. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 RTRW Provinsi

Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2041;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
28. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 31.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah teknis di bidang kelautan dan perikanan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang Kelautan dan perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan, dan isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

5. BAB V PENUTUP

Pada Bab ini dikemukakan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan Dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota BandarLampung diuraikan ke dalam susunan organisasi, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. mempunyai fungsi kesekretariatan :

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- b. Pengelolaan dan penyusunan program dan informasi;

- c. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sekretariat dibantu oleh :

- **JF Perencana Ahli Muda**

JF Perencana Ahli Muda mempunyai tugas:

- 1. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana dinas;
- 2. Menghimpun dan mengintegrasikan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- 3. Menyiapkan bahan koordinasi terkait penyusunan program dan informasi;
- 4. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan

prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat dinas;

2. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan serta pensiun pegawai;
3. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji, dan pengadministrasian perjalanan dinas;
2. Melakukan pengelolaan urusan aset;
3. Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporannya;
4. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
5. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan pengelolaan keuangan dan aset;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perikanan Tangkap meliputi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Sumberdaya Ikan, dan Teknik Penangkapan Ikan, serta Pengembangan Usaha, dan Statistik Perikanan Tangkap. Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dibantu oleh a) JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda; b) JF Pengawas Perikanan Ahli Muda; dan c) JF Analis Pasar Hasil Perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap yang meliputi sarana dan prasarana perikanan tangkap, sumberdaya ikan dan teknik penangkapan, serta pengembangan usahadan statistik perikanan tangkap;
- b. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, serta pelaksanaan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan untuk meningkatkan pelaksanaan dan pembangunan pelabuhan perikanan dalam kewenangan Kota Bandar Lampung;
- c. Penyiapan usulan pembangunan dan pengelolaan pelabuhanperikanan dan tempat pelelangan ikan pada wilayah perbatasandan kewenangan daerah kota Bandar Lampung;

- d. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan tangkap dengan kapasitas sampai dengan 5 gross ton(GT) dengan mengembangkan sarana alat tangkap yang diizinkan sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pencatatan armada dan rekomendasi pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 5 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- f. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan serta pelaksanaan penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT;
- g. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi klasifikasi kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan serta pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut wilayah Kota Bandar Lampung;
- h. Pelaksanaan dukungan rekayasa dan teknologi penangkapan ikan serta koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kota Bandar Lampung;
- i. Pelaksanaan fasilitasi perolehan permodalan, kemitraan, promosi dan investasi perikanan tangkap, termasuk pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, inventarisasi, identifikasi perencanaan dan

- pengelolaan data statistik perikanan tangkap yang mencakup perairan laut dan perairan umum serta informasi pengembangan usaha dibidang perikanan tangkap serta kelembagaannya;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Budidaya Perikanan, Kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh JF Analis Akuakultur Ahli Muda, JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda, dan JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda. Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, meliputi cakupan dan penetapan standar/pedoman Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; Teknik budidaya, kesehatan ikan dan sumber daya ikan, dan Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya;
- b. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- c. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap peredaran dan penggunaan sarana produksi perikanan budidaya;
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi produksi perikanan budidaya yang terbaharukan;

- e. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan potensi dengan menetapkan prinsip-prinsip jaminan keamanan pangan serta pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan, peredaran, serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, dan pakan ikan.
- f. Pelaksanaan kebijakan produksi pembenihan perikanan di air tawar, kebijakan mutu benih/induk ikan, dan pelaksanaan kebijakan rekomendasi izin ekspor, impor induk/benih ikan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan kemitraan, permodalan, promosi, dan inventasi dibidang usaha perikanan budidaya kewenangan Kota Bandar Lampung;
- h. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi perencanaan dan pengelolaan data statistik perikanan budidaya yang mencakup perairan darat, perairan laut dan perairan umum yang merupakan kewenangan kabupaten/kota serta informasi pengembangan usaha dibidang perikanan budidaya dan kelembagaan serta kerjasama antar instansi terkait;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

dibidang penguatan daya saing kelautan dan perikanan. Cakupan pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,serta JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda.Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mencakup Bina mutu, dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, Akses pasar, promosi, dan peningkatan kapasitas pasar; sistem logistik, distribusi, dan tata kelola;
- b. Pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik dan usaha bidang kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka penerapan norma, standar,prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi, serta penguatan promosi, termasuk peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bina mutu, diversivikasi, penguatan promosi dan peningkatan logistik produk kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan cakupan bidang Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- f. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana cakupan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- g. Pengembangan kelembagaan, kerjasama, akses permodalan, promosi, investasi dan kemitraan serta teknologi produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terbaharukan;
- h. Pelaksanaan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mutu di unit pengolahan, sesuai prinsip Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT/HACCP) dan regulasi terkait lainnya;
- i. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan dan pengembangan ikan konsumsi dan non konsumsi sesuai dengan standar dan kewenangan Kota Bandar Lampung;
- j. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi perencanaan dan pengelolaan data statistik pengolahan hasil perikanan yang mencakup hasil dari sumberdaya perairan laut dan perairan umum serta informasi pengembangan usaha, serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh JF Pengelola

Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, serta JF Pengawas Perikanan Ahli Muda. Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi pendayagunaan, rehabilitasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatandan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi pendayagunaan, rehabilitasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Termasuk monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan, perencanaan, pembinaan, pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kewenangan kota Bandar Lampung;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, perencanaan dan rehabilitasi serta sosialisasi peraturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan perlindungan sumberdaya perikanan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dan koordinasi pengamanan;

- g. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan serta lingkungannya agar tetap lestari dan berkelanjutan;
- h. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansiterkait dalam cakupan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Perangkat Daerah

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

- a. JF Perencana Ahli Muda
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

3. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :

- a. JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
- b. JF Pengawas Perikanan Ahli Muda
- c. JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda

4. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

- a. JF Analis Akuakultur Ahli Muda
- b. JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda
- c. JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda

5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, membawahi :

- a. JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli

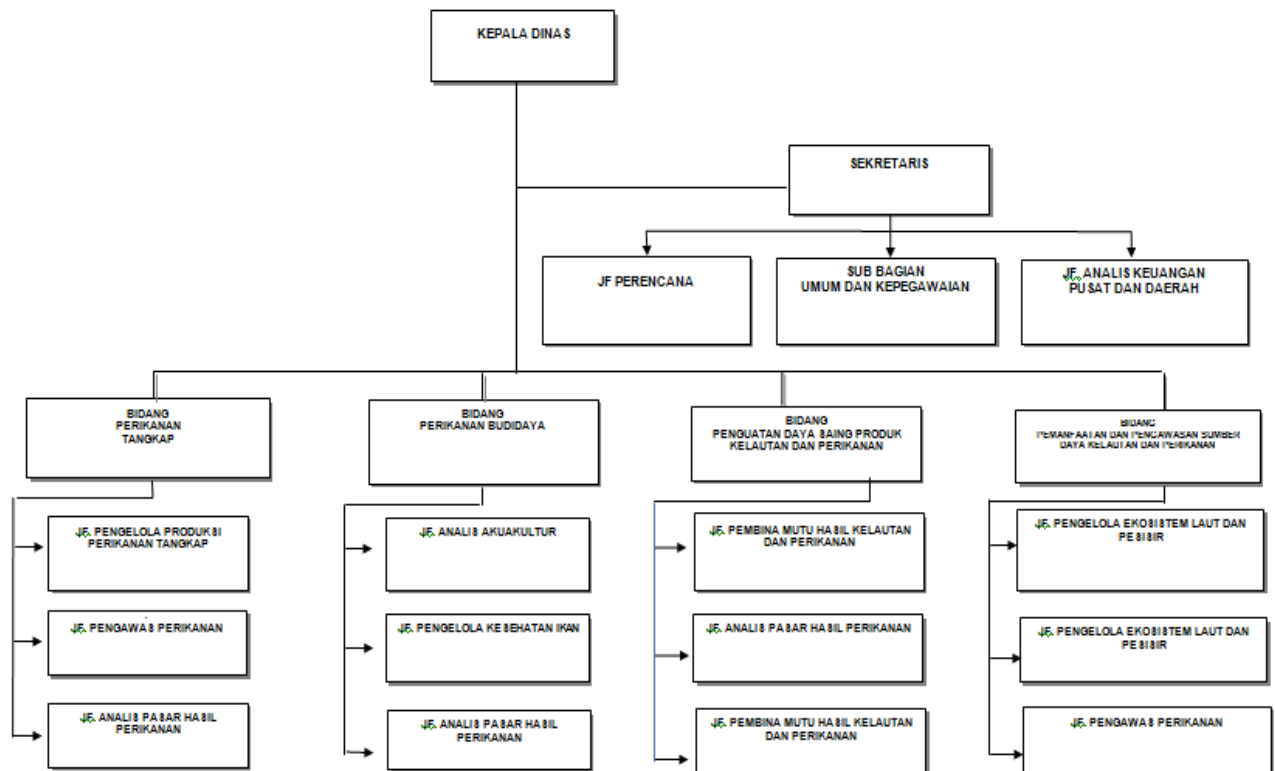
Muda

- b. JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
- c. JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda

6. Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :

- a. JF Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda
- b. JF Pengawas Perikanan Ahli Muda
- c. JF Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :



Gambar Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Alam

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan Panjang garis pantai 27,1 Km yang terbentang dari Kecamatan Panjang sampai Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kota Bandar Lampung juga memiliki 2 buah pulau.

Sumber Daya Aparatur

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung terdapat total pegawai sejumlah 53 orang, terdiri dari 21 Pegawai Negeri Sipil, 32 orang tenaga kontrak. Adapun komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Deskripsi	Pria	Wanita	Total
1	PNS	15	6	21
2	Tenaga Kontrak	16	16	32
Total Keseluruhan		31	22	53

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
2025

Berdasarkan Tabel menggambarkan bahwa pegawai dengan jenis kelamin pria sebesar 58.49% dan wanita sebesar 41,51% dari total keseluruhan sebesar 53 orang. Sedangkan komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Deskripsi	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	JML
1	PNS	8	10	-	-	3	-	-	21
2	Tenaga Kontrak	-	14	-	7	11	-	-	32
Total Keseluruhan		8	24	-	7	14	-	-	53

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
2025

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang di tunjukkan pada Tabel 2.2, menggambarkan tingkat pendidikan aparatur

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 24 orang (45,28%) dan SMA sebanyak 14 orang (26,42%). Tingkat pendidikan merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja DKP Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik, benar, tepat sasaran, dan pencapaian. Pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang serta menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan
Golongan/Ruang

No	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	5
	Jumlah	5
2	Penata Tingkat I (III/d)	7
	Penata (III/C)	3
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
	Penata Muda (III/a)	-
	Jumlah	13
3	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-

	Jumlah	3
4	Tenaga Kontrak Daerah	32
Jumlah Total		53

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
2025

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF	Staf PNS	Staf Non PNS	JML
1	Kepala Dinas	1	-	-		-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1		2	14	17
3	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	2	2	4	8
4	Bidang Perikanan Budidaya	-	-	-		2	6	8
5	Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan	-	1	-	3	3	4	11

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF	Staf PNS	Staf Non PNS	JML
	Perikanan							
6	Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	-	1	-	2	1	4	8
Jumlah		1	2	1	7	10	32	53

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
2025

Aset-aset pendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung adalah berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta aset dokumen kearsipan. Selengkapannya aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dapat diuraikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel Inventaris dan Perlengkapan Dinas

No	Inventaris dan Perlengkapan Dinas	Jumlah Barang
1	Tanah	6
2	Alat – alat Besar	4

No	Inventaris dan Perlengkapan Dinas	Jumlah Barang
3	Alat Angkutan	23
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	22
5	Alat Pertanian	16
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	354
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	41
8	Alat – alat Kedokteran	2
9	Alat Laboratorium	11
10	Alat Persenjataan/Keamanan	3
11	Komputer	52
12	Bangunan Gedung	50
13	Jalan dan Jembatan	3
14	Bangunan Air/Irigasi	8
15	Instalasi	6
16	Jaringan	7

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung

periode tahun 2021-2026, menurut indikator kinerja pelayanan OPD indikator lainnya dapat dilihat pada Tabel.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing. Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Realisasi Capaian				Targe Kinerja Pada Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKU (Indikator kinerja Utama)								
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101.2	101.5	100.4	101.7	102.1	101.9	101.9
2.	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	104.20	103.3	103.5	103.9	104.4	104.7	104.7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

1.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	0,030	0,026	0,032	0,032	0,030	0,033
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	33,00	34,30	35,20	5,71	18,92	40,00
3.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	58,48	64,29	65,71	95,27	79,56	58,48
4.	Produksi perikanan tangkap	Ton	3232,02	3265,8	3270,00	3340,00	223,386	3309,11
5.	Produksi perikanan budidaya	Ton	131,40	153,56	155,24	165,93	138,163	143,50
6.	Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan	%	1,50	1,50	2,50	4,00	4,00	9,00

	perikanan							
7.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap /Thn	41,22	43,82	45,01	45,01	45,11	43,14
8.	Produksi perikanan tangkap	Ton	3232,02	3265,8	3270	3340	223,386	3309,11
9.	Produksi perikanan budidaya	Ton	131,4	153,56	155,24	165,93	138,163	143,5
10.	Persentase retribusi tempat pelelangan ikan dan jasa pelayanan tempat pelelangan ikan terhadap PAD (%)	52,50	55,21	60,34	63,44	66,71	75,14	75,14

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung

2025

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Bandar Lampung

No	Indikator Kinerja	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		143,50		132,58	135,23	137,93	140,69	153,56	155,24	165,93	138,163	115,82	114,80	120,30	98,20
	Produksi Perikanan Tangkap		3309,11		3057,12	3118,26	3180,62	3244,23	3265,8	3270	3340	2233,86	106,83	104,87	105,01	68,86
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan diBandingkan Jumlah Kelompok Nelayan		40		33	34	36	38	34,3	35,2	5,71	18,92	103,94	103,53	15,86	49,79

Nilai Konsumsi Ikan (Kg/kep/t h)	43,14		34,87	36,54	37,93	40,22	43,82	45,01	45,01	45,11	125,67	123,18	118,67	112,16
----------------------------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung 2025

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Bandar Lampung

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	520.000.000,00	346.410.000,00	260.992.650,00	103.998.703,00	50.350.000,00	62.624.900,00	252.587.650,00	50.765.800,00	9,68	18,100	96,780	48,81	0,61	1,83

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	186.410.000,00	98.786.900,00	43.999.859,00	0,00	24.300.000,00	98.786.900,00	0,00	0,00	13,00	100,00	0,00	0,74	4,07
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	65.000.000,00	160.000.000,00	162.205.750,00	59.998.844,00	50.350.000,00	38.324.900,00	153.800.750,00	50.765.800,00	0,00	24,00	94,82	84,61	1,28	1,70
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang														

dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota														
PROGRAM PENGELOLA AN PERIKANAN BUDIDAYA	348.400.000 ,00	222.980.000 ,00	67.343.329, 00	82.340.404, 00	273.264.432 ,00	186.016.700, 000	67.241.329, 000	4.263.250, 00	78,4 3	83,40	99,85 0	5,18	0,72	0,37
Pemberdayaa n Pembudi Daya Ikan Kecil	0,00	161.980.000 ,00	20.827.890, 00	35.000.000, 00	0,00	126.900.000, 00	20.827.890, 00	0,00	0,00	78,30	100,0 0	0,00	0,90	0,16
Pengelolaan Pembudidaya an Ikan	348.400.000 ,00	61.000.000, 00	46.515.439, 00	47.340.404, 00	273.264.432 ,00	59.116.700,0 0	46.413.439, 00	4.263.250, 00	78,4 3	96,90	99,78	9,01	0,65	0,36
PROGRAM PENGAWASA N SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	60.450.000, 00	150.000.000 ,00	43.139.898, 00	44.999.921, 00	29.174.853, 00	34.597.000,0 0	31.389.912, 00	20.714.600 ,00	48,2 6	23,10	72,76	46,0 3	1,27	0,92
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/K ota	60.450.000, 00	150.000.000 ,00	43.139.898, 00	44.999.921, 00	29.174.853, 00	34.597.000,0 0	31.389.912, 00	20.714.600 ,00	48,2 6	23,10	72,76	46,0 3	1,27	0,92

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	448.040.000 ,00	495.000.000 ,00	646.307.574 ,00	99.001.809, 00	182.559.700 ,00	46.800.000,0 0	633.119.374 ,00	95.659.300 ,00	40,7 5	9,45	97,96	96,6 2	0,85	4,65
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	35.000.000, 00	35.000.000, 00		31.970.000, 00		34.300.000,0 0		31.730.000 ,00		98,00		99,2 5	0,96	0,93
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	448.040.000 ,00	460.000.000 ,00	646.307.574 ,00	67.031.809, 00	182.559.700 ,00	12.500.000,0 0	633.119.374 ,00	63.929.300 ,00	40,7 5	2,70	97,96	95,3 7	0,85	16,94

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung 2025

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung
Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
Periode Pelaksanaan 2021-2024

Indikator dan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PAINDA TAHUN PERENCANAAN (2024)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENANGGUBAH		
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM						2021	2022		2023		2024		2021	2022		2023		2024		2021	2022		2023		2024							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Penyelesaian Urusan Pem	3	25	01		PROGRAM PENJANGURUSAN PERINTAHAN	Cakupan Penerimaan Kebutuhan Penujangan Urusan	%	98,00	98,00	4.503.500,342,00	98,00	3.608.349,115,00	98,00	4.161.630,596,00	98,00	4.445.274,547,00	98,00	4.503.500,342,00	98,00	3.344.597,229,00	98,00	3.676.117,746,00	98,00	3.850.446,255,00	98,00	3.774.727,588,00	100,00	92,69	100,00	83,30	100,00	86,62	100,00	83,82	

	Tin dak lanj ut yan g dip erlu kan dal am triw ula n beri kut nya :							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.4 Kelompok Sasaran dan Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok nelayan
2. Kelompok pembudidaya ikan
3. Kelompok usaha hasil kelautan dan perikanan
4. Masyarakat umum yang membutuhkan data sumber daya kelautan dan perikanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak-pihak antara lain sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan, dalam memberikan fasilitas asuransi bagi para nelayan
2. Lembaga MUI, dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
3. KUD Mina Jaya, dalam mengelola Tempat Pelelangan Ikan
4. Instansi Pemerintah lainnya dalam hal kelautan dan perikanan
5. Pihak swasta yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang berakar pada kompleksitas sumber daya dan tantangan struktural. Beberapa persoalan utama di antaranya

adalah terbatasnya kapasitas pengawasan terhadap wilayah laut yang sangat luas sehingga menyulitkan penegakan hukum atas praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Selain itu, rendahnya tingkat adopsi teknologi di sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, menghambat efisiensi dan produktivitas pelayanan teknis.

Di sisi lain, nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan, fasilitas produksi, serta pasar yang berkelanjutan, yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan mereka. Persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut serta lemahnya integrasi antar sektor juga menciptakan konflik kepentingan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa pelayanan DKP memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, adopsi teknologi modern, serta peningkatan sinergi lintas sektor.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang menuntut respons kebijakan secara adaptif dan terarah. Isu paling mendesak adalah pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk mencegah overfishing dan menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Selain itu, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha menjadi prioritas strategis, melalui penyediaan akses terhadap pelatihan, permodalan, teknologi, dan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan *cold storage*. Penguatan sistem pengawasan laut dan penegakan hukum terhadap aktivitas perikanan ilegal juga merupakan isu penting, seiring dengan komitmen pemerintah

dalam menjaga kedaulatan maritim. Strategi lainnya mencakup pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan UMKM kelautan-perikanan, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang mengancam ekosistem pesisir. Dalam konteks ekonomi biru dan transformasi kelautan nasional, DKP dituntut untuk memperluas inovasi teknologi, membangun rantai pasok yang efisien, dan meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global. Dengan demikian, isu-isu ini harus dijawab melalui pendekatan holistik dan integratif yang melibatkan kolaborasi multipihak.

Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan serta pengolahan produk hasil kelautan dan Perikanan	Rendahnya kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan	Pemanfaatan potensi ekonomi lokal dan efisiensi pemanfaatan SDA	Tekanan pasar global dan kebutuhan standar sektor kelautan dan perikanan	Dorongan industrialisasi berkelanjutan	Kompetisi antar daerah dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan	Belum terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tahun 2025 - 2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal - hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, merumuskan tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah:

“Meningkatkan dan menjaga ketersediaan ikan konsumsi yang berkualitas dan tetap lestari.”

Dengan sasaran sebagai berikut:

“Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”

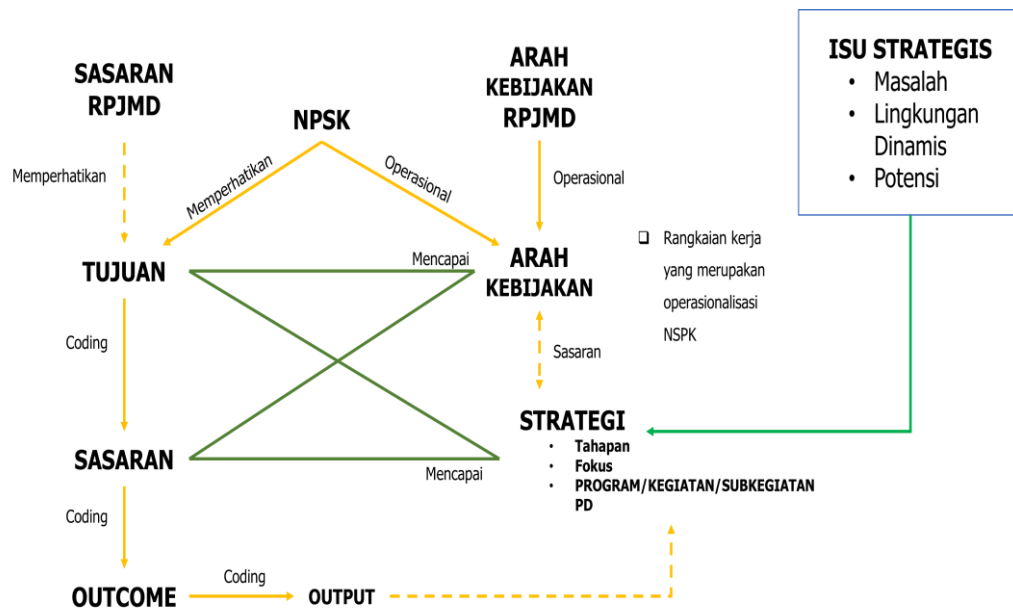
3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tahun 2025 - 2029

Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, merumuskan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah:

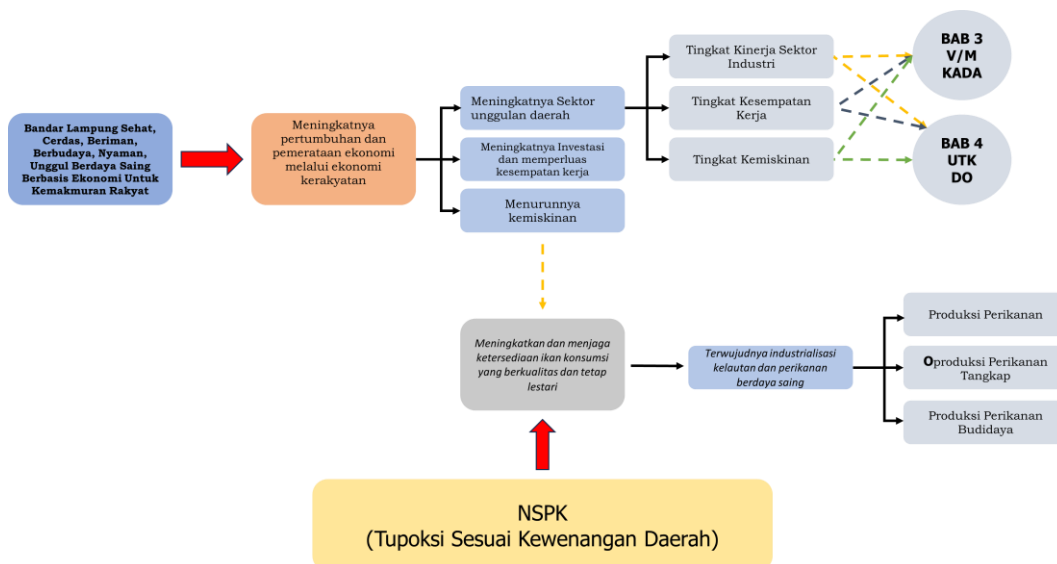
“Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

VISI	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat									
MISI	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat									
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Norma (Intergritas, Profesionalisme, Pelayanan Prima)	Meningkatkan dan Menjaga Ketersediaan Ikan Konsumsi yang Berkualitas dan Tetap Lestari	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan	3452,61	3452,61	3625,25	3632,09	3634,86	3640,34	
Standar (Standar Pelayanan, Standar Industri, Standar Keamanan)			Produksi Perikanan Tangkap	3309,11	3309,11	3474,57	3480,65	3482,73	3486,88	
Prosedur (Prosedur Perizinan, Prosedur Pengawasan, Prosedur Pembinaan)			Produksi Perikanan Budidaya	143,5	143,5	150,68	151,44	152,13	153,46	

Kriteria(Kriteria Penilaian Kinerja, Kriteria Penilaian Industri, Kriteria Keamanan Industri)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan

daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap: 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap: 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap: 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap: 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap: 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya: 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya: 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya: 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya: 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya: 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan: 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan: 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan: 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan: 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan: 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung 2025

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Norma (Integritas, Profesionalisme, Pelayanan Prima)	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Menyalurkan bibit ikan, pakan, dan sarana prasarana produksi perikanan skala kecil pada masyarakat dan/ pembudidaya ikan skala kecil	
	Standar (Standar Pelayanan, Standar Industri, Standar Keamanan)		Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat	
	Prosedur(Prosedur Perizinan, Prosedur Pengawasan, Prosedur Pembinaan)		Meningkatkan pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan	
	Kriteria(Kriteria Penilaian Kinerja, Kriteria Penilaian Industri, Kriteria Keamanan Industri)			

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Jenis Program di Dinas Kelautan dan Perikanan ada 5 (lima) yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	PROGRAM	URAIAN KINERJA PROGRAM
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservatif
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung akan di tampilkan dalam diagram berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

4.2 Uraian Kegiatan

Rencana Kerja yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, yaitu:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, terdiri dari kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

4) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renacana Strategis Perangkat Daerah**

VISI	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat					
MISI	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat					
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatkan dan menjaga ketersediaan ikan konsumsi yang berkualitas dan tetap lestari	Terwujudnya industriasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan: 1.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.1.1. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pendanaan, Kemitraan Usaha 1.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.2.1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan: 2.1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 2.1.1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil 2.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.2.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1

VISI	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat					
MISI	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat					
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan	Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservatif	3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan: 3.1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 3.1.1. Pengawasan Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil sesuai kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Kg/Kap/Thn)	4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kegiatan: 4.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 4.1.1. Pembinaan terhadap penerapan persyaratan

VISI	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat					
MISI	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat					
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
						perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko 4.2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4.2.1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4.2.2. Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2025-2030 lebih lengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
									TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Total		TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN									5.470.903.979,00		5.638.681.551,11	-	5.909.745.870,01		6.103.704.217,91		6.173.211.176,38		6.339.701.434,31		35.635.948.228,72		
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									5.470.903.979,00		5.638.681.551,11		5.909.745.870,01		6.103.704.217,91		6.173.211.176,38		6.339.701.434,31		35.635.948.228,72		
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									5.470.903.979,00		5.638.681.551,11		5.909.745.870,01		6.103.704.217,91		6.173.211.176,38		6.339.701.434,31		35.635.948.228,72		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									5.470.903.979,00		5.638.681.551,11		5.909.745.870,01		6.103.704.217,91		6.173.211.176,38		6.339.701.434,31		35.635.948.228,72		
Meningkatkan dan menjaga kete					Produksi Perikanan	Ton	361,55													3640,34			

rsedi aan ikan kons umsi yang berk ualit as dan tetap lesta ri	Menin gkatn ya Penye lengg araan Urusa n Peme rintah Bidan g Kelau tan dan Perik anan				Hasil Penilaian Akuntabi litas Kinerja OPD oleh Inspekt rat Kota Bandar Lampun g (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	85, 00 (A)		85, 00 (A)		85, 00 (A)		85, 00 (A)		85, 50 (A)		85,5 0 (A)		85, 50 (A)			
		3.25.0 1	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/ KOTA		Cakupan Pemenu han Kebutuh an Penunja ng Urusan Pemerin tahan Bidang Kelautan dan Perikana n	%	83,8 2	98	4.975.1 29.158, 00	98	5.124.2 80.470, 08	98	5.394.14 0.056,16	98	5.581.6 30.644, 75	98	5.649.7 73.433, 96	98	5.802.86 6.005,64	98	32.527.8 19.768,5 9	
		3.25.0 1.2.01	Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah		Persenta se Pemenu han Dokume n Perenca naan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah yang Berkuali tas	%	92,5 2	100	17.050. 396,00	100	17.459. 345,22	100	18.379.4 52,71	10 0	19.114. 630,82	100	19.879. 216,05	100	20.674.3 85	10 0	112.557. 425,51	

		3.25.0 1.2.01. 0006	Koordina si dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedia nya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	4	4	17.050.3 96,00	4	17.459.3 45,22	12	18.379.4 52,71	12	19.114.6 30,82	12	19.879. 216,05	12	20.674.3 84,70	52	112.557. 425,51
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	4	4		4		12		12		12		12		52	-
		3.25.0 1.2.02	Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	Persenta se Pemenu han Dokume n Pelapora n Keuanga	%	86,5 3	100	3.730.7 32.729, 00	100	3.842.6 54.710, 87	100	4.044.97 2.619,44	10 0	4.178.4 96.510, 56	100	4.190.5 13.934, 40	100	4.285.23 6.126	10 0	24.272.6 06.630,5 1

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1	1		1		1		1		6	-
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	40.053.561,00	41.255.167,83		43.429.315,17	45.166.487,78	46.973.147,29		48.852.073,18	1	265.729.752,26		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1	1		1		1	1		6	-	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	9.643.222,00	9.932.518,66		10.455.962,39	10.874.200,89	11.309.168,92		11.761.535,68	1	63.976.608,55		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1		1	1		1		1	1		6	-	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	%	100	100	24.960.000,00	25.708.800,00	100	27.063.653,76	100	28.146.199,91	100	29.272.047,91	100	30.442.929,82	100	165.593.631,40
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1		1	1		1		1	1		6	-	

			yang Disediaka n																
3.25.0 1.2.06. 0005	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan		Tersedia nya Barang Cetakan dan Penggand aan	Paket	1	1	17.845.1 95,00		18.380.5 50,85		19.349.2 05,88		20.123.1 74,11		20.928. 101,08		21.765.2 25,12	1	118.391.4 52,05
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6	-
3.25.0 1.2.06. 0006	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- undangan		Tersedia nya Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- Undanga n	Bulan	12	12	5.400.00 0,00	12	5.562.00 0,00	12	5.855.11 7,40	12	6.089.32 2,10	12	6.332.8 94,98	12	6.586.21 0,78	12	35.825.54 5,25
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- Undanga n yang Disediaka n	Dok	12	12		12		12		12		12		12		72	-
3.25.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjunga n Tamu		Terlaksan anya Fasilitasi Kunjunga n Tamu	%	100	100	13.000.0 00,00	100	13.390.0 00,00	100	14.095.6 53,00	100	14.659.4 79,12	100	15.245. 858,28	100	15.855.6 92,62	100	86.246.68 3,02
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n tamu	Lapor an	1	1		1		1		1		1		1		6	-

		3.25.0 1.2.06. 0009	Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD		Terlaksan anya Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD	%	100	100	55.040.0 00,00	100	56.691.2 00,00	100	59.678.8 26,24	100	62.065.9 79,29	100	64.548. 618,46	100	67.130.5 63,20	100	365.155.1 87,19
					Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD	Lapor an	1	1		1		1		1		1		1	6	-	
		3.25.0 1.2.07	Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah		Pemenu han Kebutuh an Inventar is Kantor	%	41,6 7	98	59.147. 065,00	98	60.921. 476,95	98	64.132.0 38,79	98	66.697. 320,34	98	69.365. 213,15	98	72.139.8 22	98	392.402. 935,90
		3.25.0 1.2.07. 0005	Pengadaa n Mebel		Tersedia nya Mebel	Paket	1	1	25.000.0 00,00		25.750.0 00,00		27.107.0 25,00		28.191.3 06,00		29.318. 958,24		30.491.7 16,57	1	165.859.0 05,81
					Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	Paket	1	1		1		1		1		1		1	6	-	
		3.25.0 1.2.07. 0006	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedia nya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	1	34.147.0 65,00		35.171.4 76,95		37.025.0 13,79		38.506.0 14,34		40.046. 254,91		41.648.1 05,11	1	226.543.9 30,09
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	Unit	0	1		1		1		1		1		1	6	-	

		3.25.0 1.2.08	Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah		Pemenu han Jasa Penunja ng Kebutuh an OPD	%	89	98	790.20 0.000,0 0	98	813.90 6.000,0 0	98	856.798. 846,20	98	891.070 .800,05	98	926.71 3.632,0 5	98	963.782. 177	98	5.242.47 1.455,63
		3.25.0 1.2.08. 0002	Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedia nya Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	46.200.0 00,00	1	47.586.0 00,00		50.093.7 82,20		52.097.5 33,49		54.181. 434,83		56.348.6 92,22	13	306.507.4 42,74
					Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	Lapor an	12	12		12		12		12		12		12	72	-	
		3.25.0 1.2.08. 0004	Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor		Tersedia nya Jasa Pelayana n Umum Kantor	Bulan	12	12	744.000. 000,00	12	766.320. 000,00	12	806.705. 064,00	12	838.973. 266,56	12	872.532 .197,22	12	907.433. 485,11	12	4.935.964 .012,89
					Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n	Lapor an	1	1		12		12		12		12		12	61	-	
		3.25.0 1.2.09	Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah		Inventar is Kantor yang Terpelih ara	%	51,5 5	98	187.78 0.000,0 0	98	193.41 3.400,0 0	98	203.606. 286,18	98	211.750 .537,63	98	220.22 0.559,1 3	98	229.029. 381	98	1.245.80 0.164,44

		3.25.0 1.2.09. 0001	Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Tersedia nya Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Bulan	12	12	38.670.0 00,00	12	39.830.1 00,00	12	41.929.1 46,27	12	43.606.3 12,12	12	45.350. 564,61	12	47.164.5 87,19	72	256.550.7 10,19		
				Jumlah Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan Dibayark an Pajaknya	Unit	1	1		1		1	-	1		1		1		6	-		
		3.25.0 1.2.09. 0002	Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	Tersedia nya Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	Bulan	12	12	104.170. 000,00	12	107.295. 100,00	12	112.949. 551,77	12	117.467. 533,84	12	122.166 .235,19	12	127.052. 884,60	12	691.101.3 05,41		

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16		16		16		16		16		16		-	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1	6.940.000,00	1	7.148.200,00	1	7.524.910,14		7.825.906,55		8.138.942,81		8.464.500,52	3	46.042.460,01
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	25		16		16		16		16		16		16	-
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	0	1	38.000.000,00	1	39.140.000,00	1	41.202.678,00	1	42.850.785,12		44.564.816,52		46.347.409,19	4	252.105.688,83
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1		25		25		25		25		25		25	-

		3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	0	1		1		1	-	1	-					4	-
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1		1		1		1						4	
												-								
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan																				
	3.25.03	PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi perikanan tangkap	Ton	2233,86	2375,00	246.111.374,00	2.375,00	255.357.778,32	2410,00	255.955.828,967	2431,00	259.166.538,88	2.433,00	259.843.736,57	2450,00	266.494.584,57	2450,00	1.542.929.841,32

perik anan berda ya saing	3.25.0 3.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		26	0,00	27	40.000.000	27	40.000.000	28	40.000.000	28	40.000.000	29,00	40.000.000	29	200.000.000		
	3.25.0 3.2.01. 0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Dok		1	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	6	200.000.000		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit				1										1	-		
	3.25.0 3.2.01. 0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	Unit		1					-		-				-	1	-		

		3.25.0 3.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik	%	84,61	100	188.031.378,00	100	155.101.357,81	100	155.560.818,69	100	158.005.328,92	100	158.523.507,47	100	163.605.709,26	100	978.828.100,15
		3.25.0 3.2.03. 0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bulan	12			12		12		12		12		12	-	12	-
				Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1	188.031.378,00	1	155.101.357,81	1	155.560.818,69	1	158.005.328,92	1	158.523.507,47	1	163.605.709,26	5	978.828.100,16
																				-
		3.25.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	138,00	144,00	82.968.980,00	144,00	86.086.124,58	142,80	86.287.739,20	143,60	87.370.132,60	144,21	87.598.429,257	144,86	89.840.560,784	144,86	520.151.966,42
		3.25.0 4.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	%	2	2	33.030.000,00	2	34.274.433	2	34.356.881	2,5	34.786.341,57	2,5	34.877.920,37	2,5	35.770.407	2,5	207.095.982,20
		3.25.0 4.2.02. 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok			33.030.000,00		34.274.432,83		34.356.880,56		34.786.341,57		34.877.920,37		35.770.406,87		207.095.982,20

				Jumlah Kelompo k Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikut i Pengemb angan Kapasitas	Kelo mpok					5		5	-	8		10,0 0		18, 00	-
	3.25.0 4.2.02. 0004	Pemberia n Pendamp ingan, Kemudah anan Akses Ilmu Pengetah uan, Teknologi dan Informasi , Serta Penyelen ggaraan Pendidik an dan Pelatihan		Terpenuh inya Pendamp ingan, Kemudah anan Akses Ilmu Pengetah uan, Teknologi dan Informasi , serta Penyelen ggaraan Pendidik an dan Pelatihan	Kelo mpok	0												-	-
				Jumlah Kelompo k Usaha yang Mempero leh Pendamp ingan, Kemudah anan Akses Ilmu Pengetah uan, Teknologi dan Informasi , Serta Penyelen ggaraan Pendidik an dan Pelatihan	Kelo mpok	7	10		5					5	-	5	-	20, 00	-

		3.25.0 4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya	%	9,01	2	49.938. 980,00	2	51.811. 691,75	2	51.930.8 58,64	2	52.583. 791,03	2,5	52.720. 508,89	2,5	54.070.1 53,91	2,5	313.055. 984,22		
		3.25.0 4.2.04. 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket			49.938.9 80,00		51.811.6 91,75		51.930.8 58,64		52.583.7 91,03		52.720. 508,89		54.070.1 53,91	-	313.055.9 84,22		
					Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	2	2		2		2		2		2		2		10	-		
		3.25.0 4.2.04. 0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit														-	-		
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		2												2,0 0	-		

		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservatif	Hektar	-	0,50	51.534.342,00	0,50	53.470.487,23	1,00	53.595.715,68	1,20	54.268.020,34	1,30	54.409.821,74	1,30	55.802.472,02	1,30	323.080.859,01		
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW	%	4	5	51.534.342,00	5	53.470.487,23	6	53.595.715,68	6	54.268.020,34	6	54.409.821,74	6	55.802.472,02	6	323.080.859,01		
		3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Compliance (Persentase Kepatuhan) Usaha Bidang Perikanan Budidaya	%														-	-		
				Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha				1				1						2	-		

		3.25.0 5.2.01. 0006	Pengawa san usaha pemasara n hasil perikana n dan/atau usaha pengolah an hasil perikana n sesuai kewenan gan kabupate n/kota	Usaha pemasara n hasil perikana n dan atau usaha pengolah an hasil perikana n sesuai kewenan gan kabupate n/kota yang diawasi	%			51.534.3 42,00	53.470.4 87,23	53.595.7 15,68	54.268.0 20,34	54.409. 821,74	55.802.4 72,02	-	323.080.8 59,01		
				Jumlah pelaku usaha pemasara n hasil perikana n dan/atau usaha pengolah an hasil perikana n sesuai kewenan gan kabupate n/kota	Pelaku Usaha				1			1		2,0 0	-		
		3.25.0 5.2.01. 0007	Pengawa san usaha penangka pan ikan dan/atau usaha pengangk utan ikan sesuai kewenan gan kabupate n/kota	Usaha Penangka pan Ikan dan/atau Usaha Pengangk utan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahak an dalam Kabupate	%	4						-		-	-		

[illegible]

			Mikro dan Kecil																	
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanaan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanaan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		31.030.000,00	33.406.244,37	33.488.098,45	33.906.699,68	33.994.857,10	34.864.586,55	-	200.690.486,15						
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanaan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada	Unit Usaha		8	7	7	5	6	6	33	-							

				Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton				4	5		5		6		6		20	-			
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit			52.008.574,00	38.958.895,53		39.083.000,98		39.759.038,50		39.902.986,41		41.308.502,86	-	251.020.998,29			
				Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	1			1	1		2		3		4		7	-			
	3.25.06.3.04	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro		Nilai ekspor hasil perikanan	USD	110.000,00	125.000,00	-	127.000,00	-	128.000,00	-	128.000,00	-	129.000,00	-	129.000,00	-	129.000,00	-		

[illegible]

		3.25.0 6.3.06	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun			-	-	45,48	-	45,56	-	45,63	-	45,72	-	45,72	-		
		3.25.0 6.3.06. 0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		1	2											2	-		
					Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kg/Kap/Tahun					45,48		45,56	-	45,63	-	45,72	-	45,72	-		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Melalui peran Kepala Dinas, dijabarkan dua sasaran utama dari program prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan, serta peningkatan produksi perikanan budidaya. Sasaran ini diturunkan ke dalam empat outcome kunci: terwujudnya industrialisasi perikanan yang berdaya saing, meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta meningkatnya kontribusi retribusi TPI terhadap PAD. Untuk mendukung pencapaian tersebut, ditetapkan tiga indikator utama, yakni produktivitas dan kontinuitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir. Kerangka ini menjadi acuan dalam pengukuran kinerja dan perencanaan program DKP secara terarah dan terukur.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan: 1.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.1.1 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pendanaan, Kemitraan Usaha 1.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.2.1. Pelayanan Penyelenggaraan	

			Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
2.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan: 2.1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 2.1.1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil 2.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.2.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan mandat yang diberikan. Indikator ini disusun secara spesifik dan terukur, mencerminkan ketercapaian sasaran strategis serta mendukung arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam konteks Dinas Kelautan dan Perikanan, indikator kinerja perangkat daerah mencakup aspek produksi, kapasitas, serta pemberdayaan pelaku utama perikanan sebagai hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan teknis.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	0,032	0,033	0,034	0,034	0,035	0,035	
2.	Persentase retribusi tempat pelelangan ikan dan jasa pelayanan tempat pelelangan ikan terhadap PAD	%	0,064	0,065	0,065	0,066	0,066	0,067	
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	6,00	6,00	8,00	9,25	9,75	10,00	
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	58,47	58,48	59,00	59,04	53,78	59,22	
5.	Produksi perikanan tangkap	Ton	2375,00	2.375,00	2410,00	2431,00	2.433,00	2450,00	
6.	Produksi perikanan budidaya	Ton	144,00	144	142,80	143,60	144,21	144,86	
7.	Luasan Kawasan Konservatif	Hektar	0,5	0,5	1,0	1,20	1,30	1,30	
8.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	45,33	45,33	45,48	45,56	45,63	45,72	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sementara itu, indikator kinerja kunci (IKK) adalah ukuran yang dipilih secara selektif dari keseluruhan indikator perangkat daerah, yang dinilai paling strategis dan kritikal dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKK berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena ketercapaian indikator ini secara langsung mencerminkan

efektivitas kinerja perangkat daerah terhadap target pembangunan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	0,032	0,033	0,034	0,034	0,035	0,035	
2.	Persentase retribusi tempat pelelangan ikan dan jasa pelayanan tempat pelelangan ikan terhadap PAD	%	0,064	0,065	0,065	0,066	0,066	0,067	
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	6,00	6,00	8,00	9,25	9,75	10,00	
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	58,47	58,48	59,00	59,04	53,78	59,22	
5.	Produksi perikanan tangkap	Ton	2375,00	2.375,00	2410,00	2431,00	2.433,00	2450,00	
6.	Produksi perikanan budidaya	Ton	144,00	144	142,80	143,60	144,21	144,86	
7.	Luasan Kawasan Konservatif	Hektar	0,5	0,5	1,0	1,20	1,30	1,30	
8.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	45,33	45,33	45,48	45,56	45,63	45,72	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2025-2029 dengan prakiraan maju di tahun 2030.

Rencana Strategis tersebut merupakan ratifikasi dari RPJMD Kota Bandar Lampung, yang menjadi sebuah pedoman untuk diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam sektor Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

Terdapat beberapa indikator Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini untuk melihat kinerja apakah sesuai dengan target yang di proyeksikan hingga tahun 2029 mendatang, dan pada tiap tahunnya akan dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta lebih baik dan tepat sasaran, InsyaAllah rencana yang dimuat dalam dokumen ini dapat terencana sesuai dengan kaidah, tepat sasaran dan diberkahi oleh Allah SWT, Aammin yaa robbal alammin.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tabel 6.1. (TC.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Bandar Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi				
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Total		TOTAL			
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN							5,470,903,979.00		5,638,681,551.11	-	5,909,745,870.01		6,103,704,217.91		6,173,211,176.38		6,339,701,434.31		35,635,948,228.72			
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5,470,903,979.00		5,638,681,551.11		5,909,745,870.01		6,103,704,217.91		6,173,211,176.38		6,339,701,434.31		35,635,948,228.72			
3.2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5,470,903,979.00		5,638,681,551.11		5,909,745,870.01		6,103,704,217.91		6,173,211,176.38		6,339,701,434.31		35,635,948,228.72			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							5,470,903,979.00		5,638,681,551.11		5,909,745,870.01		6,103,704,217.91		6,173,211,176.38		6,339,701,434.31		35,635,948,228.72			
Meningkatkan dan menjaga ketersediaan ikan konsumsi yang berkualitas dan tetap lestari				Produksi Perikanan	Ton	#REF!												#REF!				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan			Hasil Pemilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Nilai		85,00 (A)		85,00 (A)		85,00 (A)		85,00 (A)		85,50 (A)		85,50 (A)		85,50 (A)			
	3.25.01	PROGRAM PENJINJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	%	83.82	98	4,975,129,158.00		5,124,280,470.08	98	5,394,140,056.16		5,581,630,644.75	98	5,649,773,433.96	98	5,802,866,005.64	98	32,527,819,768.59			
	3.25.01.2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	92.52	100	17,050,396.00		17,459,345.22	100	18,379,452.71		19,114,630.82	100	19,879,216.05	100	20,674,385	100	112,557,425.51			
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	4	4	17,050,396.00		17,459,345.22	12	18,379,452.71		19,114,630.82	12	19,879,216.05	12	20,674,384.70	52	112,557,425.51			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4			4	12			12		12		12	52	-			
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akutabel	%	86.53	100	3,730,732,729.00		3,842,654,710.87	100	4,044,972,619.44		4,178,496,510.56	100	4,190,513,934.40	100	4,285,236,126	100	24,272,660,630.51			
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14		3,576,903,979.00		3,684,211,098.37		3,878,369,023.25		4,005,228,770.52		4,010,315,484.76		4,097,829,738.61		23,252,858,094.51			
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	33			33	33			33		34		34		34	-		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12	153,828,750.00		158,443,612.50		166,603,596.19		173,267,740.04		180,198,449.64		187,406,387.62		1,019,748,535.99			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12			12	12			12		12		12		72	-		
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		100	15,000,000.00		15,450,000.00	100	16,264,215.00		16,914,783.60	100	17,591,374.94	100	18,295,030	100	99,515,403.49			
	3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1						-		-					-			
			Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	0		1	1		1						4	-			
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%		100	15,000,000.00		15,450,000.00	100	16,264,215.00		16,914,783.60	100	17,591,374.94	100	18,295,029.94	100	99,515,403.49			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3			4	3		3		4		4			21	-		
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%		72.48	98	175,218,968.00	98	180,475,537.04	98	189,986,597.84	98	197,586,061.76	98	205,489,504.23	98	213,709,084	98	1,162,465,753.13		
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Tangga	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Tangga	Paket		1	1	9,276,990.00		9,555,299.70		10,058,863.99		10,461,218.55		10,879,667.30		11,314,853.99	1	61,546,893.53			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Total		TOTAL			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	40,053,561.00		41,255,167.83		43,429,315.17		45,166,487.78		46,973,147.29		48,052,073.18	1	265,729,752.26		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	9,643,222.00		9,932,518.66		10,455,962.39		10,874,200.89		11,309,168.92		11,761,535.68	1	63,976,608.55		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	%	100	100	24,960,000.00	100	25,708,800.00	100	27,063,653.76	100	28,146,199.91	100	29,272,047.91	100	30,442,929.69	100	165,593,631.27		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	17,845,195.00		18,380,550.85		19,349,205.88		20,123,174.11		20,928,101.08		21,765,225.12	1	118,391,452.05		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	5,400,000.00	12	5,562,000.00	12	5,855,117.40	12	6,089,322.10	12	6,332,894.98	12	6,586,210.78	12	35,825,545.25		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	12	12		12		12		12		12		12		72		-	
		3.25.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	100	13,000,000.00	100	13,390,000.00	100	14,095,653.00	100	14,659,479.12	100	15,245,858.28	100	15,855,692.62	100	86,246,683.02		
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	Laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	100	55,040,000.00	100	56,691,200.00	100	59,678,826.24	100	62,065,979.29	100	64,548,618.46	100	67,130,563.20	100	365,155,187.19		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	41.67	98	59,147,065.00	98	60,921,476.95	98	64,132,038.79	98	66,697,320.34	98	69,365,213.15	98	72,139,822	98	392,402,935.90		
		3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket	1	1	25,000,000.00		25,750,000.00		27,107,025.00		28,191,306.00		29,318,958.24		30,491,716.57	1	165,859,005.81		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	1	34,147,065.00		35,171,476.95		37,025,013.79		38,506,014.34		40,046,254.91		41,648,105.11	1	226,543,930.09		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1		1		1		1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Pemenuhan Kebutuhan OPD	%	89	98	790,200,000.00	98	813,906,000.00	98	856,798,846.20	98	891,070,800.05	98	926,713,632.05	98	963,782,177	98	5,242,471,455.63		
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	46,200,000.00	1	47,586,000.00		50,093,782.20		52,097,533.49		54,181,434.83		56,348,692.22	13	306,507,442.74		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		12		72		-	
		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	744,000,000.00	12	766,320,000.00	12	806,705,064.00	12	838,973,266.56	12	872,532,197.22	12	907,433,485.11	12	4,935,964,012.89		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1		12		12		12		12		12		61		-	
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	51.55	98	187,780,000.00	98	193,413,400.00	98	203,606,286.18	98	211,750,537.63	98	220,220,559.13	98	229,029,381	98	1,245,800,164.44		
		3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	38,670,000.00	12	39,830,100.00	12	41,929,146.27	12	43,606,312.12	12	45,350,564.61	12	47,164,587.19	72	256,550,710.19		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
								TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Total		TOTAL		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit	1	1		1		1	-	1		1		1		6		-	
		3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	104,170,000.00	12	107,295,100.00	12	112,949,551.77	12	117,467,533.84	12	122,166,235.19	12	127,052,884.60	12	691,101,305.41		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16		16		16		16		16		16		16		-	
		3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1	6,940,000.00	1	7,148,200.00	1	7,524,910.14		7,825,906.55		8,138,942.81		8,464,500.52	3	46,042,460.01		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	25		16		16		16		16		16		16		-	
		3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	0	1	38,000,000.00	1	39,140,000.00	1	41,202,678.00	1	42,850,785.12		44,564,816.52		46,347,409.19	4	252,105,688.83		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1		25		25		25		25		25		25		-	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	0	1		1		1	-	1	-				4		-		
		3.25.01.2.09.0011																				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1		1		1		1					4				
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing		3.25.03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	2233.86	2375.00	246,111,374.00	2,375.00	255,357,778.32	2410.00	255,955,828.967	2431.00	259,166,538.88	2,433.00	259,843,736.57	2450.00	266,494,584.57	2450.00	1,542,929,841.31		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%		26	0.00	27	40000000.00	27	40,000,000.00	28	40,000,000.00	28	40,000,000.00	29.00	40,000,000.00	29	200,000,000.00		
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota	Dok		1	0.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	6	200,000,000.00		
				Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit			1										1		-		
		3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	Unit		1					-		-				-	1		-	
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit		1		1		10		8			8		28		-		
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap	%	0	2	58,079,996.00	2	60,256,420.51	2	60,395,010.28	2.5	61,161,209.96	2.5	61,320,229.11	2.5	62,888,875.31	2.5	364,101,741.16		
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Unit Usaha	0		58,079,996.00		60,256,420.51		60,395,010.28		61,161,209.96		61,320,229.11		62,888,875.31	0	364,101,741.16		
				Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	0	15		1						20		22		58		-	
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik	%	84.61	100	188,031,378.00	100	155,101,357.81	100	155,560,818.69	100	158,005,328.92	100	158,523,507.47	100	163,605,709.26	100	978,828,100.15		

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bulan	12		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Total		TOTAL		
				Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1	188,031,378.00	1	155,101,357.81	1	155,560,818.69	1	158,005,328.92	1	158,523,507.47	1	163,605,709.26	5	978,828,100.15		
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	138.00	144.00	82,968,980.00	144.00	86,086,124.58	142.80	86,287,739.20	143.60	87,370,132.60	144.21	87,598,429.257	144.86	89,840,568.784	144.86	520,151,966.42		
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan	%	2	2	33,030,000.00	2	34,274,433	2	34,356,881	2.5	34,786,341.57	2.5	34,877,920.37	2.5	35,770,407	2.5	207,095,982.20		
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok			33,030,000.00		34,274,432.83		34,356,880.56		34,786,341.57		34,877,920.37		35,770,406.87		207,095,982.20		
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok					5		5		-	8		10.00		18.00		-	
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhnya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	0													-		-	
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	7	10		5						5	-	5	-	20.00		-	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	%	9.01	2	49,938,980.00	2	51,811,691.75	2	51,930,858.64	2	52,583,791.03	2.5	52,720,508.89	2.5	54,070,153.91	2.5	313,055,984.22		
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket			49,938,980.00		51,811,691.75		51,930,858.64		52,583,791.03		52,720,508.89		54,070,153.91	-	313,055,984.22		
				Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	2	2		2		2		2		2		2		10		-	
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit														-		-	
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		2												2.00		-	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservatif	Hektar	-	0.50	51,534,342.00	0.50	53,470,487.23	1.00	53,595,715.68	1.20	54,268,028.34	1.30	54,409,821.74	1.30	55,802,472.02	1.30	323,080,859.01		
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan legal fishing dan RKZAW	%	4	5	51,534,342.00	5	53,470,487.23	6	53,595,715.68	6	54,268,028.34	6	54,409,821.74	6	55,802,472.02	6	323,080,859.01		
		3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Compliance (Persentase Kepatuhan) Usaha Bidang Perikanan Budidaya	%														-		-	
				Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha				1				1						2		-	
		3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	%			51,534,342.00		53,470,487.23		53,595,715.68		54,268,028.34		54,409,821.74		55,802,472.02	-	323,080,859.01		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
								TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Total		TOTAL		
				Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan /atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha						1				1				2.00		-	
		3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan /atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan /atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Disusutkan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawati	%	4								-					-		-	
				Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan /atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	1	1					5				6		-	6.00		-	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	45.00	45.33	115,160,125.00	45.33	119,486,690.90	45.48	119,766,530.00	45.56	121,268,881.35	45.63	121,585,754.85	45.72	124,697,811.29	45.72	721,965,793.39		
		3.25.06.2.01	Pemberikan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	-	75,000,000.00		
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	%					15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	-	75,000,000.00		
				Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dok	1			1		1		1		1		1		4.00		-	
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya ijin edar dan hasil produk	Dok		5	31,030,000.00	5	33,406,244.37	6	33,488,098.45	6	33,906,699.68	7	33,994,857.10	7	34,864,586.55	29.00	200,690,486.15		
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha			31,030,000.00		33,406,244.37		33,488,098.45		33,906,699.68		33,994,857.10		34,864,586.55	-	200,690,486.15		
				Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		8		7		7		5		6		6		33		-	
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					84,130,125.00		71,080,446.53		71,278,431.55		72,362,181.67		72,590,897.75		74,833,224.74	-	446,275,307.24		
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton			32,121,551.00		32,121,551.00		32,195,430.57		32,603,143.17		32,687,911.34		33,524,721.87	-	195,254,308.95		
				Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton				4		5		5		6		6		20		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Total		TOTAL		
								52,000,574.00		38,958,895.53		39,083,000.98		39,759,038.50		39,902,986.41		41,308,502.87	-	251,020,998.29		
				Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	1			1		1		2		3		4		7		-	


Rizkiyati, N.N.W.
Pembina
NIP. 19750815 200902 1 002



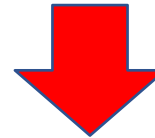
**POHON KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
RENSTRA TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TUSI DKP

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 2; Nomor Register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Nomor 02/1260/BL/2022);

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;



Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Kelautan dan Perikanan

LOGICAL FRAMEWORK

RPJMD 2025-2029

VISI

**BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA,
NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT**

MISI ke-4

**Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat**

TUJUAN

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Ekonomi Kerakyatan

SASARAN

Menurunnya Kemiskinan

RENSTRA DKP 2025-2029

TUJUAN

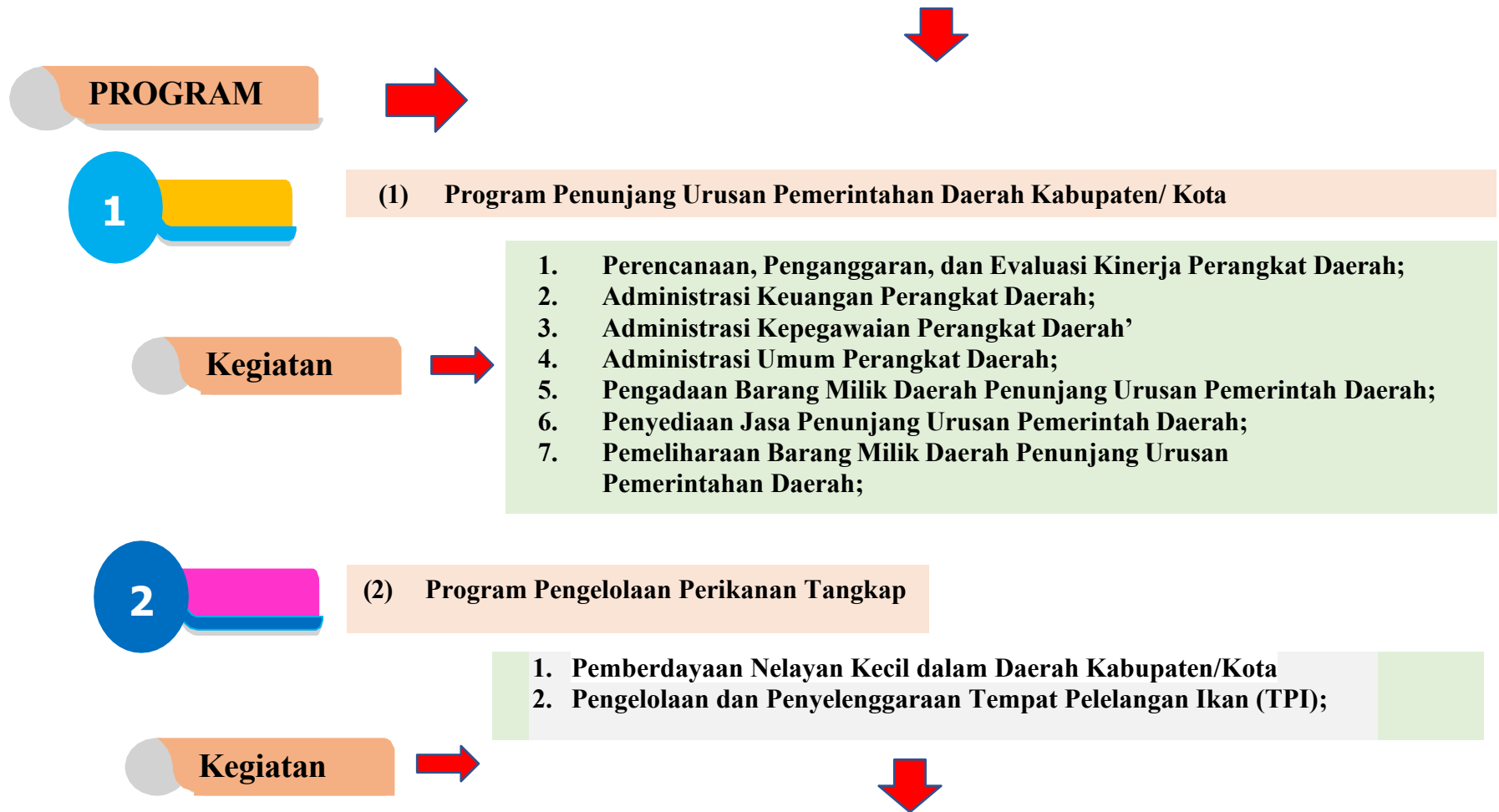
Meningkatkan dan Menjaga Ketersediaan Ikan Konsumsi yang Berkualitas dan Tetap Lestari

SASARAN

1. Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
2. Produksi Perikanan Tangkap;
3. Produksi Perikanan Budidaya;
4. Persentase retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan terhadap PAD

STRATEGI

Mengoptimalkan potensi sumberdaya bidang kelautan dan perikanan guna peningkatan ketersediaan ikan konsumsi yang berkualitas melalui pelaksanaan program-program unggulan bidang kelautan dan perikanan



(3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan



1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

3

(4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan



Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota;

4

(5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

CASCADING KINERJA

WALI KOTA

Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan dengan tercukupinya ketersediaan protein ikan untuk masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan

INDIKATOR

- 1) Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap yang bersumber dari hasil penangkapan ikan di laut yang menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan;
- 2) Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya yang bersumber dari budidaya ikan darat dan laut;

KEPALA DINAS

1. Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap

3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

4. Meningkatnya persentase retribusi TPI dan jasa TPI terhadap PAD

INDIKATOR

Tersalurkannya bibit dan sarana prasarana produksi perikanan skala kecil pada masyarakat

Meningkatnya produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan

Meningkatnya produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan budidaya untuk kesejahteraan pembudidaya ikan

Meningkatnya pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan

CROSSCUTTING KINERJA

ESELON III (SEKRETARIS DAN KABID) antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan tangkap;

2. Meningkatnya produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas perikanan budidaya;

3. Meningkatnya persentase kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;

4. Meningkatnya iptek SDM aparatur dan pelaku usaha perikanan dan diversifikasi produk perikanan;

INDIKATOR

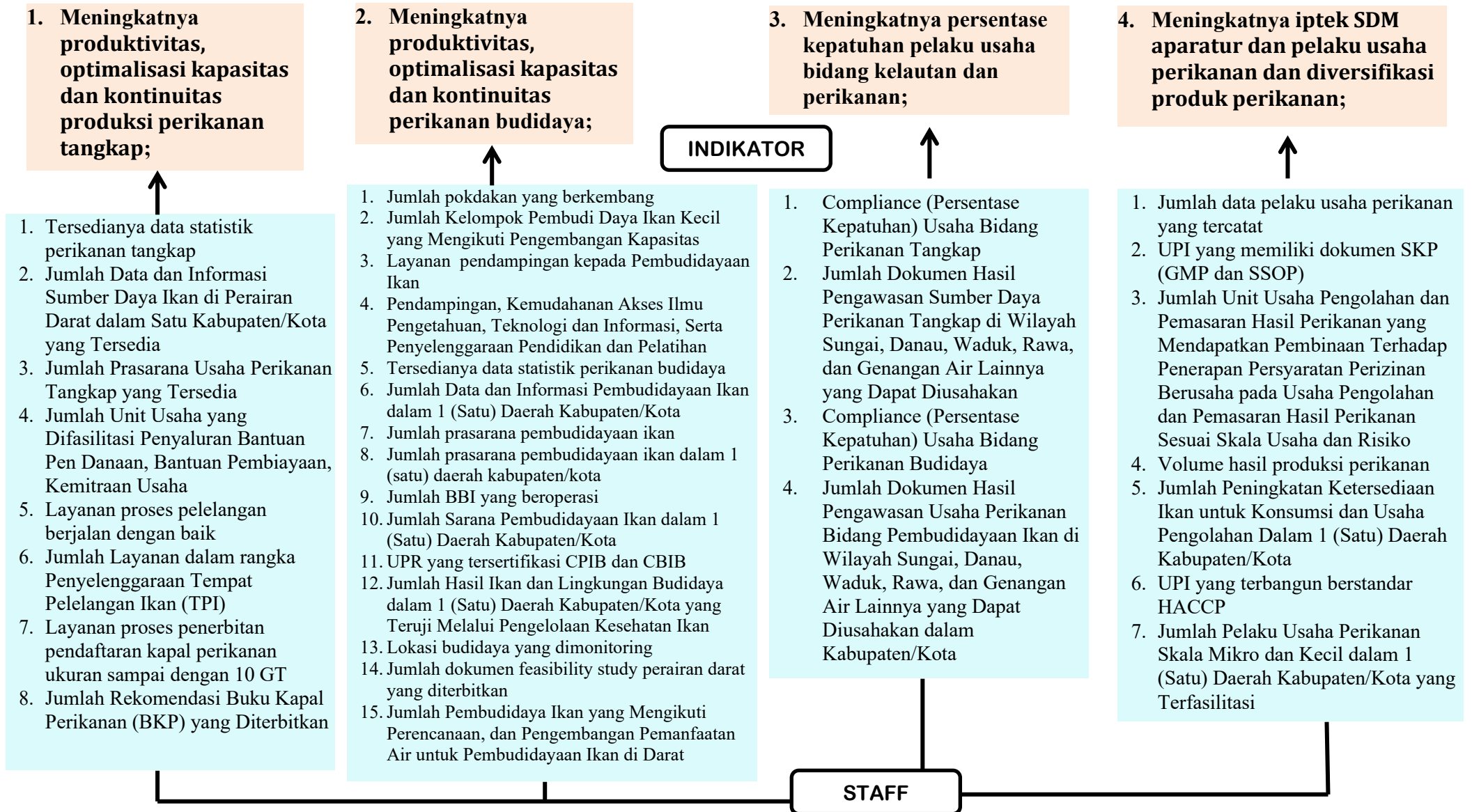
- Persentase proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
- Persentase cakupan bina kelompok nelayan
- Persentase produksi perikanan kelompok nelayan
- Jumlah produksi perikanan tangkap

Jumlah produksi perikanan budidaya

Compliance (Persentase Kepatuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan

Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI)

ESELON IV/FUNGSIONAL antara lain:



**CASCADING
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

VISI WALI KOTA

Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing
berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

Misi 4

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan RPJMD

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi Melalui Ekonomi Kerakyatan

Sasaran

Menurunnya Kemiskinan

Tujuan DKP

Meningkatkan dan Menjaga Ketersediaan Ikan
Konsumsi yang Berkualitas dan Tetap Lestari

Sasaran DKP

1. Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
2. Produksi Perikanan Tangkap
3. Produksi Perikanan Budidaya
4. Persentase retribusi tempat pelelangan ikan dan jasa pelayanan tempat pelelangan ikan terhadap PAD

**PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP**

- Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
- Cakupan bina kelompok nelayan
- Produksi perikanan kelompok nelayan
- Produksi perikanan tangkap

**Pemberdayaan Nelayan
Kecil dalam Daerah
Kabupaten/Kota**

- Meningkatnya peranan nelayan kecil di bidang perikanan tangkap

**Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)**

- Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan TPI dengan Baik

**PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA**

- Produksi perikanan budidaya

**Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan**

- Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya

**Pemberdayaan Pembudi
Daya Ikan Kecil**

- Persentase bertambahnya kelompok pembudidaya ikan

**PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

- Compliance (Persentase Ketuhan) pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan

**Pengawasan Sumber Daya Perikanan
di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawan, dan Genangan Air Lainnya
yang dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota**

- Persentase cakupan kawasan yang dipantau dari kegiatan ilegal fishing dan RZKAW

**PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN**

- Angka Konsumsi Ikan

**Kegiatan Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan bagi
Usaha Pengolahan dan Pemasaran
Skala Mikro dan Kecil**

- Terbitnya izin edar dan halal produk

**Penyediaan dan Penyaluran Bahan
Baku Industri Pengolahan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota**

- Nilai ekspor hasil perikanan